

BAB IV

KONTRIBUSI SUJATIN KARTOWIJONO

DALAM PERSATUAN WANITA REPUBLIK

INDONESIA (PERWARI) TAHUN 1945-1960

A. Kontribusi Sujatin Kartowijono Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program utama PERWARI dalam memberdayakan kaum perempuan. Program ini dilakukan atas dasar kesempatan yang semakin terbuka bagi kaum perempuan untuk bersaing atas dasar kualitas dengan laki-laki dimasa kemerdekaan.

Bagi PERWARI, pendidikan dinilai akan sangat membantu peningkatan sumber daya kaum perempuan, dalam rangka memanfaatkan terbukanya berbagai bidang pekerjaan. Bagaimanapun dibanding dengan kaum laki-laki, kaum perempuan sangatlah jauh tertinggal kualitas sumber dayanya. Apabila tetap dibiarkan tanpa tersentuh pendidikan, perempuan akan semakin tertinggal dari kaum laki-laki. Melalui pendidikan diharapkan akan mempercepat tujuan emansipasi,yaitu mendorong perempuan untuk

mempunyai dunia lain di luar dunia domestik, tidak hanya dapur, anak dan pakaian.¹

Secara umum, ada dua konsep pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya perempuan yang berkembang dalam PERWARI, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal.

Pendidikan formal berdasarkan dengan peningkatan kualitas perempuan, memiliki beberapa fungsi, yaitu, *pertama*, berkaitan dengan kualitas profesionalisme, keterampilan dan kejuruan, yang sangat berguna dalam memperkuat posisi untuk memasuki berbagai bidang lapangan pekerjaan. *Kedua*, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan atau intelektual yang sudah tertinggal jauh dari laki-laki. *Ketiga*, menjadi tempat informasi dan interaksi sosial budaya, yang dapat membantu pembentukan cara pandang yang lebih pluralis, demokratis dan terbuka.²

Sementara, pendidikan informal lebih mengandalkan peran keluarga sebagai basisnya. Keluarga dinilai sangat menentukan terutama dalam menentukan karakter positif seorang anak. Meskipun sudah banyak perempuan yang memasuki ruang-ruang

¹ Yuni Saria Rahayu, *Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Perempuan*, (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), p.56

² Yuni Saria, *Konsistensi Perwari Dalam ...*, p. 47

kelas pendidikan formal, namun orang tua tidak lepas tanggung jawab dan mengandalkan para guru dalam pendidikan anak, termasuk anak perempuan. Dalam hal ini pendidikan keluarga, kaum ibu memiliki peran yang lebih dominan dibanding suami dan anggota keluarga yang lain.³

Di kalangan PERWARI tumbuh kesadaran bahwa pendidikan sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan. PERWARI menyadari bahwa ketertinggalan kaum perempuan di bidang pendidikan menjadikan mereka tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Ketertinggalan kaum perempuan adalah salah satu sebab marginalisasi perempuan. Oleh karena itu, kalangan PERWARI menekankan pentingnya pendidikan sebagai sasaran kegiatan organisasinya.

Namun yang dikembangkan PERWARI dalam memberdayakan perempuan melalui pendidikan tersebut masih tetap berbasis bias gender yang menyisakan persoalan ketidakadilan gender. Pendidikan itu memang untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki ketika mencari pekerjaan dan mengejar karir, namun ketika sudah mendalami karir

³ Yuni Saria, *Konsistensi Perwari Dalam ...*, p. 58

dan pekerjaan tersebut, perempuan tetap tidak boleh lupa peran-peran domestiknya. Bahkan, keterampilan khusus yang didapat dari berbagai pelatihan dan kursus lebih untuk meningkatkan kemampuan dalam membina rumah tangga.⁴

Pada tahun 1949, Sujatin Kartowijono bekerja di Jawatan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, di Jawatan Pendidikan Masyarakat. Dengan tugas utama melibatkan diri dalam pendidikan non formal kaum perempuan.⁵

Sebagai seorang yang bekerja di Jawatan Pendidikan dan ketua umum PERWARI, Sujatin Kartowijono sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk meninjau secara langsung perkembangan pendidikan kaum perempuan terutama dalam kegiatan pemberantasan buta huruf (PBH).⁶

Pada tahun 1955, Sujatin mengunjungi Palembang. Disana banyak di buka kursus PBH, termasuk di rumah-rumah penduduk yang berada di atas air. Semangat peserta, terutama kaum perempuan sangat tinggi, karena menurut mereka ini adalah salah satu jalan menuju kemajuan. Sebaliknya bagi kaum laki-laki, kursus

⁴ Yuni Saria, *Konsistensi Perwari Dalam ...*, p. 93

⁵ Hanna Rambe, *Mencari Makna Hidupku Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), p. 69

⁶ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 69

ini dianggap pembuangan waktu. Mereka lebih suka mencari nafkah di luar rumah. Sampai akhirnya banyak wanita yang cerdas, setelah lulus PBH dan mahir membaca serta menulis, bahkan menjadi tenaga pengajar PBH untuk kalangan laki-laki.

Mata pelajaran yang diajarkan dalam PBH di Palembang antara lain membaca, menulis pertanian sederhana, soal gizi untuk keluarga dan membuat batik. Di Ciamis Sujatin Kartowijono pernah menemukan kursus PBH yang mencantumkan pelajaran kesehatan, yakni kebersihan rumah dan pekarangan, mengatur gizi sederhana dan jenis tanaman kebun yang berkhasiat bagi tubuh manusia.⁷

Kerjasama yang erat yang sudah lama terjalin antar PERWARI dan Jawatan Pendidikan Masyarakat, membuat GERWANI sering menuduh Sujatin Kartowijono memakai perjalanan dinasnya untuk kepentingan PERWARI. Padahal tuduhan tersebut tidaklah benar. Setiap perkumpulan salah satunya PERWARI haruslah berhubungan baik dan bekerja sama dengan jawatan yang ada hubungannya dengan peningkatan kecerdasan anak bangsa.⁸

⁷ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 113

⁸ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 109

Pada saat Sujatin Kartowijono melakukan perjalanan ke Jawa Timur, salah satunya di Blitar dan menginap di rumah bendahara PERWARI. Di kota ini ada sebuah cabang yang giat dan trampil. Sudah mempunyai dua puluh lima Taman Kanak-Kanak (TK) yang menjadi tujuan utama peninjauan Sujatin Kartowijono selama dua hari.⁹

B. Kontribusi Sujatin Kartowijono Dalam Bidang Politik

Menurut Sujatin Kartowijono dalam buku *Aneka PERWARI* karangan Yetti Rizali Noor bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk warga perempuannya, harus memiliki pengertian tentang politik terlebih khususnya mereka yang berkecimpung dalam organisasi perempuan. Dalam era pembangunan bangsa, selayaknya ada pengertian yang baik dan mendalam mengenai usaha politik pemerintah, jika menginginkan tercapainya tujuan negara yang adil, makmur dan sejahtera.¹⁰

Jika pemimpin memimpin dan kader politik perempuan telah cukup banyak, ada dua jalan yang dapat ditempuh mereka

⁹ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 87

¹⁰ Yetti Rizali Noor, *Aneka Perwari*, (Jakarta: Perwari, 1980), p. 18

untuk mencapai kedudukan dan perbaikan nasib perempuan dan kemajuan perempuan seluruhnya, yaitu:

1. Masuk dalam partai politik atau organisasi yang berpolitik, sesuai ideologinya, hendaknya mereka langsung menjadi anggota dari partai politik atau organisasi politik, jangan membentuk golongan perempuan tersendiri. Menurut Sujatin Kartowijono, dengan menempatkan diri sama dengan kaum laki-laki, perempuan akan lebih dapat manfaat dari pada bila mereka membentuk kumpulan perempuan yang berfaliasi dengan suatu partai. Politik tidak membedakan laki-laki dan perempuan.
2. Jika pemimpin-pemimpin perempuan itu kurang merasa cocok dengan partai politik, mereka tanpa menjadi anggota suatu partai politik, dapat menempatkan diri dalam masyarakat luas dan secara terus menerus mengembangkan faham pengetahuan politiknya, hingga dapat sumbangan kepada masyarakat tentang persoalan politik.

Sujatin Kartowijono dalam buku *Aneka PERWARI* mengatakan adanya hambatan yang masih dirasakan dan mempengaruhi perempuan dalam politik, yaitu:

1. Sisa-sisa dari feodalisme, yang masih membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, kesan Sujatin Kartowijono, pemerintah misalnya belum dapat mempercayakan jabatan-jabatan tinggi dengan tanggung jawab besar kepada perempuan.
2. Kaum perempuan sendiri nampaknya kurang menunjukkan ambisi untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan.¹¹

PERWARI merupakan organisasi sekuler berdasarkan Pancasila. Ketuanya tidak boleh menjadi anggota organisasi politik apapun sedangkan untuk anggota dibebaskan. Sekalipun demikian beberapa anggota menyatakan bahwa mereka mendapat nasihat dari laki-laki anggota partai politik (PNI dan Pesindo) agar bergabung dengan PERWARI. Setelah perang kemerdekaan selesai, PERWARI banyak kehilangan anggotanya yang bergabung ke dalam sayap perempuan partai-partai politik atau organisasi baru

¹¹ Yetti Rizali Noor, *Aneka Perwari*, (Jakarta: Perwari, 1980), p. 18

seperti GERWANI. Banyak di antara mereka memiliki keanggotaan rangkap, tetapi tidak aktif di PERWARI. Meskipun dalam demonstrasi pada 1953 PERWARI paling lantang dan berpengaruh di antara organisasi perempuan, bahkan Sujatin Kartowijono selaku ketua menyadari akan organisasinya yang semakin melemah. Merosotnya PERWARI setelah Ir. Soekarno menikahi Hartini, ketika itu, banyak perempuan yang menjadi takut dihubungkan dengan organisasi yang radikal dengan berani melawan presiden.¹²

Tahun 1954 Sujatin Kartowijono melakukan perjalanan ke Cirebon. PERWARI mengadakan rapat daerah. Disitulah diputuskan kami akan turut bertanding dalam pemilihan umum yang pertama kali. Sujatin Kartowijono akan ditempatkan sebagai calon PERWARI, sebagai *vote-getter*. Akan tetapi Sujatin Kartowijono tidak bersedia duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sujatin Kartowijono mengusulkan nama Ibu Andreas, jika mendapat suara yang cukup. Dan akan diadakan daftar pencalonan terbuka untuk daerah Jakarta, Bandung dan Cirebon.¹³

¹² Saskia Eleonora Weiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Paska Kejatuhan PKI*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), p. 193

¹³ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 105

Tahun 1955 Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama. Partai-partai politik sibuk mengumpulkan suara. Antara lain dengan mengajak kaum perempuan untuk mendirikan seksi atau bagian perempuan dari partai mereka.

Menurut Sujatin kartowijono dalam buku *Mencari Makna Hidupku* karangan Hanna Rambe, ia tidak setuju dengan cara kerja seperti itu. Menurutnya kalau perempuan ingin terjun ke kancah politik, jangan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya seorang perempuan masuk ke sebuah partai politik karena ia ingin berjuang dan setuju dengan pandangan politik yang dianut partai tersebut. Dengan tidak terlebih dahulu menjadi anggota seksi perempuan partai politik, karena dalam ilmu politik, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹⁴

Dalam persiapan pemilihan umum 1955, pada awalnya PERWARI tidak bergabung dengan sayap perempuan partai politik dan tidak melakukan kampanye bagi calonnya sendiri. Akan tetapi, mereka melakukan konfrontasi langsung terhadap partai dengan program perjuangan sendiri, termasuk undang-undang perkawinan yang progresif, masalah kesehatan dan pendidikan.

¹⁴ Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 89

Program itu dikirim kepada 15 partai politik dan mendiskusikannya. Akhirnya hanya PSI dan PNI menyatakan setuju dengan program tersebut. Walaupun mereka tidak mencantumkan satu butir pun program itu ke dalam program mereka sendiri. Tidak ada partai yang mendukung posisi PERWARI dalam hubungannya dengan perkawinan Ir. Soekarno dengan Hartini. PERWARI memutuskan untuk mendukung calon-calon dari PSI dan PNI yang juga menjadi anggotanya, tetapi segera disadari bahwa mereka memegang kepentingan partai di atas program PERWARI. Baru kemudian akhirnya PERWARI mengangkat calon mereka sendiri termasuk Sujatin Kartowijono, tetapi tidak ada yang terpilih.¹⁵

C. Kontribusi Sujatin Kartowijono Dalam Memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu masalah utama yang dialami perempuan Indonesia. Masalah kedudukan wanita di dalam perkawinan dan keluarga seperti kawin paksa, poligami, perceraian,

¹⁵ Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan...*, p. 195

dan lain sebagainya menjadi faktor yang mendorong lahirnya pergerakan perempuan Indonesia.¹⁶

Pada tahun 1949 kedaulatan Indonesia telah diakui secara internasional, Sujatin Kartowijono berfikir bahwa sekaranglah waktunya memperbaiki kedudukan wanita melalui undang-undang. Sujatin Kartowijono menerima beberapa aduan kasus perceraian, perkawinan dibawah umur, pemaduan tanpa izin istri pertama, perkawinan adat atau agama yang kacau balau.

Banyak perempuan sangat merasakan perlunya reformasi perkawinan. Sejumlah orang termasuk dari anggota organisasi perempuan Islam, memutuskan diri bergabung kedalam gerakan perempuan berkaitan dengan pengalaman pribadi mereka dalam perkawinan. Ketika Sujatin Kartowijono melakukan perjalanan ke cabang-cabang PERWARI di berbagai pelosok negeri pada tahun 1953, masalah utama yang dikemukakan kaum perempuan ialah soal perkawinan dan perceraian. Segera setelah tercapainya kemerdekaan, terjadi banyak pernikahan bawah tangan, pada 1950 hampir separuhnya terjadi di Jawa dan Madura, pada 1951 hampir 60% dan pada 1952 hampir 62%. Para lelaki menginginkan istri

¹⁶ Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), p. 22

yang lebih muda dan patuh dibanding para aktivis perempuan yang dinilainya sebagai kawan seiring selama perjuangan.¹⁷Salah satunya antara lain:

“Ny. Muninggar menikah ketika perang. Ia ingin masuk menjadi anggota PERWARI yang baru didirikan, akan tetapi suaminya melarang. Ia tidak dapat menerima larangan itu, dia bergabung dan melakukan kegiatan. Terjadilah perselisihan yang sangat keras. Tetapi sebenarnya sang suami hendak menghindar dari tanggung jawabnya, ia muak dengan sikap bebas istrinya. sang suami telah memiliki simpanan yang lebih muda dari pada Muninggar. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia pergi ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraianya. Pengadilan setuju bahwa seorang istri harus melayani suaminya, dengan mudah pengadilan mengabulkan permohonan cerainya. Muninggar tidak pernah menyangka bahwa ia akan dicerai dengan begitu mudahnya.”

Untuk mewujudkan putusan KOWANI mengenai masalah perkawinan maka Sujatin Kartowijono sebagai ketua PERWARI mengambil inisiatif atas kata sepakat dari para pengurus KOWANI untuk mengadakan demonstrasi wanita pada tanggal 17 Desember 1953 yang bertepatan dengan hari ulang tahun PERWARI dan dipimpin oleh PERWARI. Tujuan demonstrasi ini ialah menuntut Undang-Undang Perkawinan dan pencabutan P.P.19.

¹⁷ Saskia, Eleonora Weiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Paska Kejatuhan PKI*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), p. 183

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 merupakan keputusan pemerintah yang mengatur pensiun janda pegawai negeri. Dalam hal poligami maka uang pensiun sebesar dua kali lipat yang akan di bagi sama diantara para janda yang bersangkutan (dengan tidak lebih dari empat istri). Untuk menutup anggarannya maka pegawai membayar premi pensiun, mereka berpoligami membayar premi tambahan, cara ini merupakan sangsi yang harus di bayar bagi yang berpoligami.

Masyumi, Muslimat NU dan dua organisasi Islam menyetujui peraturan tersebut. PERWARI mempelopori dengan melakukan protes. Pada bulan November 1952, 19 organisasi perempuan menyatakan menentang “pemborosan uang negara untuk mengongkosi poligami” yang menurut pandangan mereka akan mendorong meningkatnya jumlah poligami.¹⁸

Organisasi yang memprotes PP. No.19 tersebut melakukan demonstrasi pada 17 Desember 1953, yang bertepatan dengan hari ulang tahun PERWARI. Tetapi perpecahan gerakan perempuan yang selama perjuangan kemerdekaan mereda, kini mencuat. Tidak ada organisasi perempuan Islam yang ikut ambil bagian, banyak

¹⁸ Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan. ...*, p. 185

anggota KOWANI secara pribadi mendukung penuh demonstrasi, tetapi sebagian anggota KOWANI tidak. Ketegangan menjadi lebih nyata antara PERWARI dan GERWANI.¹⁹

Ketegangan ini terjadi karena tanpa sepengetahuan anggota yang turut dalam demonstrasi, GERWANI turut berdemonstrasi, di barisan paling belakang. Mereka juga memamerkan *vaandel* mereka. GERWANI yang licik kemudian mendapat publikasi besar-besaran di majalah *federation of Internasional Women's Movement*, dengan kesan seolah-olah demonstrasi itu hanya dilakukan oleh GERWANI. PERWARI tidak sedikitpun disebut, apalagi dilukiskan sebagai penggagas dan pengatur demonstrasi.²⁰ Akibatnya hubungan PERWARI dan GERWANI merenggang.

Masalah tuntutan undang-undang No.19 belum mendapatkan titik terang, diperparah dengan adanya berita pernikahan Presiden Soekarno dan Hartini pada 1954. Berita tersebut menjadi pukulan mengejutkan bagi gerakan perempuan

¹⁹ Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan*. ..., p. 186

²⁰ Hanna, *Mencari Makna Hidupku* ..., p. 105

yang sedang gencar-gencarnya menuntut undang-undang pernikahan dan semangat antipoligami.²¹

Akan tetapi, apa yang diharapkan gerakan perempuan itu sia-sia. Presiden Soekarno tidak pernah menaruh perhatian dan dukungan terhadap gerakan antipoligami. Sikap Soekarno tersebut terlihat jelas ketika Soekarno menikahi Hartini. Sikap tersebut membuat hubungan diantara Soekarno dengan gerakan perempuan menjadi tegang. Popularitas Soekarno jatuh dan ide-ide yang termuat dalam bukunya Sarinah dipertanyakan.²²

Konflik terbuka antara presiden dengan gerakan perempuan meluas, salah satunya PERWARI yang bereaksi keras. Salah satu reaksi yang dilakukan Sujatin Kartowijono selaku ketua PERWARI adalah mengirimkan ajakan-ajakan melalui surat edaran yang dikirimkan kepada organisasi dan perhimpunan perempuan yang ada di Jakarta untuk melakukan reaksi terhadap pernikahan soekarno dan Hartini.

Protes terhadap perkawinan Soekarno dan Hartini tidak hanya dilakukan melalui surat edaran, tetapi juga dengan

²¹ Arifin Suryo Nugroho, *Fatmawati Soekarno The First Lady*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), p. 170

²² Arifin, *Fatmawati Soekarno...*, p. 171

menghadap presiden di Istana negara. Delegasi yang dikirim ke istana antara lain Sujatin Kartowijono dan ibu Abuhanifah yang ditugasi menemui Soekarno, sedangkan ibu Andreas dan ibu Wirosanogo menemui ibu Fatmawati. Dalam pertemuan tersebut Soekarno menjanjikan kepada delegasi perempuan yang datang ke Istana, bahwa hanya Fatmawati yang yang diperkenankan menjadi istri presiden.²³

Dalam suasana demikian, pernikahan Presiden Soekarno dengan Hartini tahun 1954, dipandang sebagai suatu tampan bagi perempuan Indonesia, maka PERWARI mengadakan rapat yang tidak menyetujui tindakan itu, karena dua alasan. *Pertama*, dipandang merendahkan kedudukan perempuan, sebab tidak diadakan perundingan dengan istri yang ada. *Kedua*, memberikan contoh yang tidak baik dan mengoyahkan sendi-sendi pendidikan dalam hidup berkeluarga.²⁴

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dikirim utusan untuk menemui Presiden Soekarno sampai dua kali, namun setelah mendengar penjelasan dari Presiden Soekarno, PERWARI tetap

²³ Arifin, *Fatmawati Soekarno...*, p. 173

²⁴ Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1977), p. 16

berpendirian bahwa tindakan itu merendahkan perempuan dan harus dicela. Akibat dari sikap PERWARI tersebut kepada seorang Presiden yang waktu itu sedang berjaya, sangat dirasakan oleh organisasi PERWARI seluruhnya dan oleh pengurus pusat khususnya.²⁵

Usaha sosial PERWARI sukar mendapat bantuan dan Sujatin Kartowijono sebagai ketua umum sendiri sering dicaci maki dan di fitnah. Setiap harinya ia menerima surat kaleng baik pagi, sore maupun malam yang isinya mengancam hendak membunuhnya. Akan tetapi Tuhan yang Maha Penyayang selalu melindunginya.²⁶

Selama masalah itu berlangsung, membuat hubungan Fatmawati dengan Sujatin Kartowijono cukup dekat. Sehingga ketika ada berita yang mengabarkan bahwa Fatmawati akan meninggalkan Istana, Sujatin Kartowijono menanyakan langsung berita tersebut kepada Fatmawati dan memberikan masukan agar tidak meninggalkan Istana. Fatmawati menerima saran tersebut, akan tetapi setelah beberapa lama Fatmawati tidak tahan lagi tinggal di Istana dan memiliki nita kuat untuk keluar dari Istana

²⁵ Sujatin, *Perkembangan Pergerakan...*, p. 16

²⁶ Sujatin, *Perkembangan Pergerakan...*, p. 17

akhirnya Sujatin Kartowijono mendukung keputusan Fatmawati untuk keluar dari istana dengan pengertian-pengertian yang Fatmawati utarakan.²⁷

Masalah yang melibatkan antara organisasi perempuan, pemerintah, Fatmawati dan Hartini berangsur-angsur mencair setelah adanya tindakan represif terhadap pers berkaitan dengan pemberitaan yang dinilai merugikan presiden. Selain itu, adanya pernyataan yang dikeluarkan Fatmawati agar masyarakat tidak menghebohkan rumah tangganya yang berkenaan dengan pernikahan Soekarno dan Hartini.²⁸

Sebelum undang-undang perkawinan tahun 1952 diganti, PERWARI berusaha membuat *talik-talak* yang terinspirasi oleh Prof. Soepomo yang dalam kongres Perempuan Pertama 1928, ia memberikan keterangan akan hal-hal yang menguntungkan kaum perempuan didalam lembaga perkawinan, sebagai seorang yang ahli dalam hukum adat Prof. Soepomo tampil dengan anjuran kodifikasi hukum adat yang mudah dicapai. Namun Sujatin Kartowijono meragukan pendapat tersebut dan meminta agar Prof. Soepomo mencari jalan agama. Dan akhirnya Prof. Soepomo memberikan

²⁷ Arifin, *Fatmawati Soekarno...*, p. 174-175

²⁸ Arifin, *Fatmawati Soekarno...*, p. 180

gagasan *talik-talak* sebagai persyaratan pertama yang diajukan perempuan sebelum melakukan ijab Kabul.²⁹

Setelah PERWARI berhasil membuat *talik-talak*. Pada saat pernikahan putri sulung Sujatin Kartowijono yakni Ratna Poedjiati tahun 1954, *talik-talak* ini dibacakan dan disiarkan oleh RRI (Radio Republik Indonesia). Adapun isi dari *talik-talak* terdiri dari sepuluh butir, diantaranya:

Setelah akad nikah, maka saya,... ikrar (mengucapkan) *talik-talak* atas istri saya, nama ... seperti di bawah ini:

1. Jika saya meninggalkan istri saya selama enam bulan berturut turut tidak dengan izin.
2. Atau, jika saya tidak memenuhi kewajiban saya memberi nafkah padanya selama tiga bulan berturut-turut.
3. Atau jika saya menganiaya istri saya atau memberi kesempatan penganiayaan terhadap istri saya
4. Atau jika saya menambang istri saya dalam masa tiga bulan berturut-turut
5. Atau jika saya beristri lagi dengan tidak ada izin dari istri saya
6. Atau jika saya berzina atau bergaul tidak sopan dengan perempuan lain sehingga mengganggu keamanan rumah tangga
7. Atau jika saya menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, pemboros, atau melakukan kejahatan serupa itu hingga mengganggu keamanan rumah tangga.
8. Atau jika saya dihukum karena kejahatan dengan hukuman satu tahun
9. Atau jika saya menderita sakit gila atau penyakit lain yang dapat membahayakan istri dan

²⁹ Hanna Rambe, *Mencari Makna Hidupku Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), p. 221

keturunannya, atau penyakit demikian sehingga tak dapat melakukan hasrat kelamin.

10. Atau jika timbul perselisihan antara saya dan istri saya yang tak dapat didamaikan lagi.

Apabila istri saya itu tidak rela dan mengadukan kepada pengadilan yang berhak mengurus hal tersebut, dan dakwaannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan itu, maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya tersebut, dengan pengertian bahwa istri saya itu tidak dapat saya rujuk jika tidak dengan persetujuannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, walau istri saya *nusju*³⁰, jika keadaan *nusju* itu diakibatkan karena salah satu perbuatan saya seperti disebut diatas.

Jika perceraian terjadi karena salah satu alasan-alasan tersebut diatas, maka saya akan memberi nafkah kepada bekas istri saya selama ia belum dapat mencari nafkah sendiri atau nikah lagi. Jika ada anak maka saya akan membiayai ongkos penghidupan mereka seluruhnya sampai dewasa.³¹

Pada tahun 1956, PERWARI melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan gerakan perempuan dengan membentuk satu bagian tentang legitimasi perkawinan, seksi hukum, yang dibuat oleh biro penasehat perkawinan di Jakarta. Biro ini di kepalai Nyonya S. Sajid, yang memfokuskan usahanya dalam memberikan anggota-anggotanya informasi lengkap tentang fikih yang berhubungan

³⁰*Nusju* ialah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, misalnya suami bertindak kasar, tidak mau menggauli istrinya dan tidak member nafkah atau sang istri pergi tanpa seizin suami

³¹Hanna, *Mencari Makna Hidupku ...*, p. 221-222

dengan perkawinan, dan dalam memberikan saran tentang pengucapan yang tepat dari taklik.³²

Tuntutan untuk legitimasi perkawinan ini dicantumkan dalam “piagam hak-hak wanita”, atas inisiatif GERWANI, yang dicantumkan oleh Majelis permusyawaratan kongres wanita Indonesia pada awal 1956.

Pada 1958, legitimasi perkawinan dipertanyakan dalam Parlemen. Nyonya Soemari, dalam jawabannya atas draf undang-undang perikawinan pemerintah masyarakat muslim, telah meminta undang-undang yang umum untuk Indonesia secara keseluruhan, dia berbicara atas tiga belas organisasi perempuan, diantaranya Bhayangkari, GERWANI, PERWARI, Persatuan Istri Tentara, Wanita Demokrat Indonesia, dan Wanita Universitas.³³

Karena penyelesaian tidak dapat dicapai juga, maka jalan tengah diminta oleh Nyonya Prijono, Nyonya Soewondo, dan Nyonya Sjahrir (tiga ahli hukum) pada 27 Juli, dari Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia. Akan tetapi jalan tengah tersebut tidak dapat juga memperoleh keputusan.

³² Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), p. 216

³³ Cora, *Sejarah Perempuan Indonesia...*, p. 218

Pada 17 Desember 1958 PERWARI melakukan diskusi panel dengan tema “Legitimasi perkawinan dari sudut pandang kesejahteraan dan keluarga”, dipimpin oleh Yetti Rizali Noor.

Pada 6 Februari 1959, legitimasi perkawinan baru didiskusikan kembali dalam sidang Parlemen. Selama beberapa pekan berikutnya terjadi perdebatan terkait masalah tersebut. Pada 26 Februari, undang-undang perkawinan untuk masing-masing agama baru diterapkan di Jawa, Minahasa, Sulawesi Utara, Ambon, tetapi tidak berlaku seluruh Indonesia.³⁴

³⁴ Cora, *Sejarah Perempuan Indonesia...*, p. 220